

**NOTULENSI
DISKUSI PERENCANAAN ANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA
PADA PEMERINTAH PUSAT**

**Lt. 3 Sekretariat MPBI, Jakarta
Kamis, 10 Mei 2010, Pukul 13.00 – 16.00 WIB**



PEMBUKAAN

Djuni Pristiyanto, MPBI
Koordinator Kegiatan

- Diskusi Pengembangan Wacana Penanggulangan Bencana (PB) yang berlangsung di MPBI ini sudah berlangsung sebanyak tiga kali. Kali ini merupakan pertemuan keempat kalinya. Peserta diskusi sudah saling kenal dalam tiga kali pertemuan di atas. Walaupun jumlah peserta diskusi ini sedikit, tapi proses-proses dan hasil diskusi didokumentasikan dengan baik dan dapat diunduh di Website MPBI.
- Agenda pada siang hari ini ada dua (2), yaitu:
 - ❖ Sesi I: Diskusi Buku “MEREDAM RISIKO BENCANA: Upaya Integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah” dengan narasumber Sunarja, IDEA.
 - ❖ Sesi II: Diskusi anggaran PB pada Pemerintah Pusat dengan narasumber Bp. Fatchul, Kabiro Perencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

- Saya mendapatkan SMS dari Bp. Fatchul BNPB bahwa beliau tidak bisa hadir dalam pertemuan ini sebagai narasumber karena secara mendadak diundang oleh DPR RI. Oleh karena itu dalam pertemuan pada siang ini hanya ada satu sesi diskusi.
- Silahkan Mas Sunarja untuk memulai paparan dan melontarkan ide-idenya dan diskusi bisa langsung dilakukan secara interaktif.

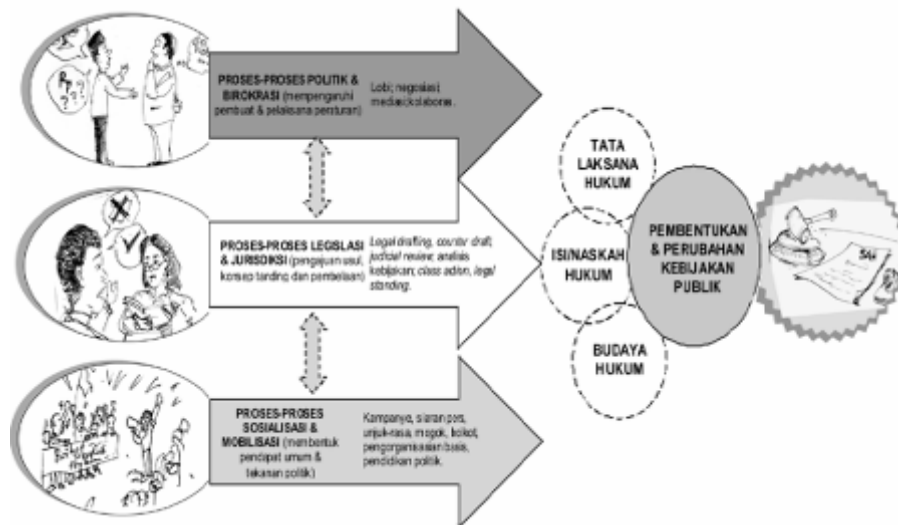
Sunarja, Koordinator Divisi Advokasi Anggaran Sensitif Risiko Perkumpulan IDEA

MEREDAM RISIKO BENCANA: Upaya Integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah

- Perkumpulan IDEA adalah lembaga yang berkomitmen pada anggaran PB. Mengapa membahas anggaran? Karena masyarakat telah berkontribusi kepada negara melalui pajak, tapi masih banyak masyarakat belum terpenuhi haknya. Bagaimana kita mendorong masyarakat agar melaksanakan kewajibannya membayar pajak tapi juga mendorong negara untuk mempertanggungjawabkan anggarannya. Negara bukan pemilik uang, tapi negara adalah sebagai pengelola dana dari masyarakat dan harus diperuntukkan lagi untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu IDEA berkonsentrasi pada masalah anggaran.
- Buku “MEREDAM RISIKO BENCANA: Upaya Integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah” ini merupakan hasil dari pengalaman IDEA dalam melakukan integrasi PRB dalam perencanaan dan penganggaran yang *pro-poor* serta tanggap dan adil gender adalah sumbangan kecil untuk mempermudah langkah dan cara warga maupun pemerintah dalam melaksanakan perencanaan dan penganggaran. Dengan kata lain buku ini merupakan hasil belajar bersama masyarakat mengenai anggaran.
- IDEA tidak fokus pada PB, misalnya pada respon tanggap darurat atau rehabilitasi dan rekonstruksi, tapi IDEA fokus pada anggaran. Setiap tahun IDEA melakukan analisis pada APBD di Kab. Gunungkidul, Kab. Kulonprogo dan Kab. Bantul untuk melihat apakah dalam APBD tersebut sudah memuat anggaran yang bermuatan PRB atau tidak.
- Isi Buku “MEREDAM RISIKO BENCANA: Upaya Integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah” antara lain:
 - ❖ Bab I: Analisis PRB dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah
 - ❖ Bab II: Integrasi PRB dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah
 - ❖ Bab III: Pemetaan Risiko Bencana untuk Perencanaan dan Penganggaran Publik
 - ❖ Bab IV: Analisis Perencanaan Pembangunan dengan Perspektif PRB
 - ❖ Bab V: Analisis APBD dengan Perspektif PRB
- Bab I: Analisis PRB Dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah
 - ❖ Kejadian bencana terbukti telah banyak menelan korban jiwa dan harta benda.
 - ❖ Anggaran PRB akan banyak menyelamatkan lebih banyak aset.
 - ❖ Perlunya perencanaan pembangunan dan penganggaran yang berperspektif PRB (kemiskinan dan gender) yang partisipatif.
 - ❖ Dicontohkan pembangunan jalan di Wonolelo, Pleret, Bantul yang menimbulkan tanah longsor.
 - ❖ Kompleksitas kebutuhan pembentukan kelembagaan (BPBD).
 - ❖ Diperlukan sinkronisasi antara pembenahan kebijakan, penyamaan persepsi, serta perbaikan sikap dan perilaku masing-masing aktor terhadap substansi PRB.
- Contoh pembangunan yang dilakukan tidak dengan partisipatif. Tujuan pembangunan adalah baik, tapi bila dilakukan dengan tidak partisipatif maka hasilnya malah akan mendatangkan kerentanan baru. Di Wonolelo, Pleret, Bantul pasca bencana gempa 27 Mei 2006 terjadi longsor di badan jalan. Dengan dana dari Provinsi dilakukan perbaikan jalan, tapi dalam pengerjaan itu tidak memperhatikan

ancaman dari adanya tebing di sepanjang tepi jalan (tidak dibuat 'talud' pada tebing) sehingga beberapa saat ketika pembangunan jalan selesai terjadi longsor lagi. Tanah pertanian dan perkebunan rusak, sehingga petani mengalami kerugian. IDEA bersama IDEA melakukan advokasi dan berhasil mendapatkan ganti rugi kepada petani yang tanamannya rusak akibat longsor.

- Kompleksitas pembentukan BPBD antara lain:
 - ❖ Jabatan Kepala BPBD yang setingkat Sekda, padahal di daerah jabatan setingkat Sekda hanya ada satu orang.
 - ❖ Dalam PP 41/2007 tidak mengkomodasi urusan PB di daerah.
 - ❖ Dana dari BNPB yang harus lewat BPBD (dana on-call dan dana rehab-rekons berpola hibah). Adanya dana itu membuat daerah membentuk BPBD dengan "instan" tapi melalui proses-proses seperti pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada umumnya. Contohnya adalah Kabupaten Bantul dan Kulonprogo yang membentuk BPBD dengan dasar Peraturan Bupati untuk dapat mengakses dana dari BNPB tersebut sebesar Rp 9 Milyar di Kulonprogo dan di Bantul sebesar Rp 14 Milyar untuk rehab-rekons. Dan yang melaksanakan rehab-rekons adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU) karena menyangkut bangunan fisik. Secara fungsi kelembagaan di BPBD itu sendiri belum terlihat.
- Saat ini paradigma di pemerintah daerah sebagian besar masih berupa respon tanggap darurat (emergency). Belum banyak pejabat di pemerintah daerah yang mempunyai paradigma PRB. Ada anggapan bahwa bila memberi anggaran di APBD untuk kegiatan kebencanaan maka kejadian bencana akan benar-benar terjadi (mencantumkan anggaran kebencanaan = harapan dan harapan itu suatu saat kemungkinan besar akan benar-benar menjadi kenyataan). Oleh karena itu jangan menganggarkan untuk kegiatan-kegiatan kebencanaan agar bencana tidak terjadi. Hal ini lebih banyak merupakan keyakinan pada orang-orang Jawa. Ini merupakan proses jangka panjang untuk mengubah paradigma ke arah PRB.
- Proses-proses advokasi anggaran dilakukan sebagai berikut (lihat gambar di bawah):



- BAB II: Integrasi PRB dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah
 - ❖ Bencana dengan perspektif gender menegaskan bahwa perempuan cenderung menjadi lebih rentan karena ketidakadilan gender
 - ❖ Kemiskinan dan keterpinggiran dalam proses kebijakan juga meningkatkan kerentanan karena banyak kebijakan tidak memperhitungkan kondisi dan kebutuhan orang miskin.
 - ❖ Pengelolaan keuangan (pendapatan dan belanja) belum berorientasi pada PRB.
 - ❖ Tantangan: Beberapa regulasi perencanaan dan penganggaran dengan regulasi PB yang belum sinkron.

- Bila terjadi bencana, kelompok-kelompok minoritas akan menjadi semakin terbebani. Misalnya saja pada kelompok perempuan banyak diposisikan dalam dapur umum, sementara laki-laki lebih banyak duduk-duduk. Juga pola bangunan di Jawa yang membangun ala kadarnya di bagian belakang dan dapur, sementara bagian depan rumah dibangun dengan baik. Oleh karena aktivitas di dapur pada sebagian besar masyarakat Jawa adalah dilakukan oleh kaum perempuan, maka ketika terjadi bencana pihak perempuan lah yang mengalami bagian terburuk. Kejadian tersebut terjadi pada gempa bumi di DIY dan Jateng pada tanggal 27 Mei 2006 dimana banyak kaum perempuan yang menjadi korban bencana.
- Perspektif gender belum dilakukan dengan baik pada pelaksanaan perencanaan pembangunan. Contohnya adalah pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa banyak dilakukan pada malam hari sehingga kaum perempuan jarang dapat ikut serta. Hal ini juga disebabkan karena masih tebalnya anggapan bahwa posisi kaum perempuan adalah mengurus anak dan rumah tangga, perempuan tidak boleh ke luar rumah pada malam hari. Selain itu dalam Musrenbangdes lebih banyak membahas hal-hal yang terkait fisik, misalnya membangun jembatan, jalan, infrastruktur, dan lain-lain.

- Ada hubungan yang sangat erat antara Bencana dengan Pembangunan (lihat gambar di bawah):



- Pembangunan yang mendatangkan kerentanan adalah seperti upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari galian C (pasir). Tambang pasir di lereng Gunung Merapi adalah akan meningkatkan PAD, tapi dampak buruk pada kerusakan jalan yang sering dilalui oleh truk-truk pengangkut pasir berlebihan tonase dan kerusakan lingkungan (sawah dan kebun), kerusakan jembatan dan lain-lain tidak sebanding dengan PAD tersebut. Di Kabupaten Klaten IDEA melakukan advokasi kepada pemerintah daerah dengan cara memaparkan dampak kerugian dari tambang pasir dan biaya untuk memperbaiki jalan dan jembatan (infrastruktur) yang rusak serta lingkungan yang rentan bencana tidak sebanding dengan jumlah PAD yang diterima dari penghasilan tambang pasir tersebut. Maka dari itu oleh Pemkab Klaten pada beberapa bagian tambang pasir ditutup usahanya.

- Pendekatan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran

- ❖ Dalam praktiknya lebih banyak pendekatan politis dari pada ketiga pendekatan yang lain.
- ❖ Ada juga semacam “balas jasa” bagi kepala daerah yang terpilih dalam pemilihan langsung kepada para pendukungnya. Balas jasa itu berupa “proyek” yang biayanya berasal dari APBD atau posisi jabatan tertentu dalam struktur pemerintah daerah yang baru.



- Aras Strategi Integrasi

Aras	Definisi
Sistemik	Terkait hal-hal yang strategis yang mengubah cara kerja sistem secara keseluruhan, contohnya dengan dibuatnya kebijakan-kebijakan baru yang menjamin PRB dalam kebijakan publik di daerah atau dibuatnya perencanaan untuk PRB.
Prosedural	Terkait dengan tata cara, mekanisme, dan prosedur pelaksanaan kebijakan publik di daerah agar lebih sensitif PRB. Contohnya adalah pembuatan Renja SKPD yang sensitif PRB atau MUSRENBANG yang memetakan risiko bencana sebagai salah satu basis informasinya.
Kelembagaan	Terkait dengan struktur pemerintahan daerah, seperti perubahan tugas pokok dan fungsi SKPD agar lebih sensitif PRB.
Perilaku	Terkait dengan perubahan perilaku stakeholder dalam meningkatkan sensitivitas terhadap PRB; misalnya dengan peningkatan kapasitas penentu kebijakan terkait dengan PRB.

- BAB III: Pemetaan Risiko Bencana untuk Perencanaan dan Penganggaran Publik
 - ❖ Proses pemetaan ancaman, kerentanan, kapasitas, risiko dan kebutuhan bersama masyarakat.
 - ❖ Advokasi Pemenuhan Hak Dasar Melalui Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran
 - ❖ MUSRENBANG merupakan mekanisme organik untuk menyusun perencanaan dan penganggaran.
- BAB IV: Analisis Perencanaan Pembangunan dengan Perspektif PRB
 - ❖ Tahapan dan sistematika penyusunan RPJMD
 - ❖ Melakukan analisis RPJMD
- Di daerah belum banyak yang punya peta risiko bencana. Peta risiko bencana menjadi dasar untuk dapat melakukan *Cost Benefit Analys* (CBA) yang berprespektif PRB.
- Integrasi PRB ke dalam pembangunan reguler oleh SKPD masih alami kebingungan. Ada asumsi bahwa urusan kebencanaan merupakan urusan Kebanglinmas (bagi daerah yang sudah membentuk BPBD maka urusan kebencanaan dipegang oleh BPBD), sementara SKPD yang lain bekerja menurut 'tupoksi'nya masing-masing. Belum terjadi sinkronisasi antar SKPD dalam urusan kebencanaan ini. Selain itu upaya untuk integrasi PRB ke dalam pembangunan reguler memunculkan pertanyaan: "Dulu ada pengarusutamaan kemiskinan, lalu ada pengarusutamaan gender, dan sekarang ada pengarusutamaan kebencanaan; semua minta diarusutamakan, lalu bagaimana memasukkan ke dalam perencanaan pembangunan?"
- Proses Musrenbang yang melibatkan partisipasi masyarakat bisa dilihat setelah hasil akhirnya di APBD, apakah usulan-usulan masyarakat diakomodasi dalam APBD dan mendapat anggaran.
- BAB V: Analisis APBD dengan Perspektif PRB
 - ❖ Kita bisa melihat seberapa besar komitmen pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya keuangan yang dimilikinya untuk kepentingan publik.
 - ❖ Fungsi dan prinsip APBD
 - ❖ Bagaimana melakukan analisis APBD
- Dalam Buku "MEREDAM RISIKO BENCANA: Upaya Integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah" alat bantu analisis APBD dengan perspektif PRB dapat ditemui pada halaman 87-91.

DISKUSI

- BPBD yang dibentuk dengan Peraturan Daerah (Perda) anggarannya sudah jelas yaitu dari APBD, tapi BPBD yang dibentuk dengan Peraturan Bupati/Walikota anggarannya belum jelas. BPBD dengan dasar Peraturan Bupati/Walikota itu akan “mengasong” dana, yang salah satunya kepada BNPB. Misalnya saja di BNPB setiap hari didatangi para personel BPBD untuk minta dana. Apakah hal ini baik atau buruk untuk praktik PB? Dana yang diterima dari APBD akan dilaporkan kepada DPRD, tapi dana-dana di luar APBD seperti dana dari BNPB tidak masuk dalam pelaporan tersebut. Dalam hal ini yang penting adalah masalah transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana/anggaran. Dana-dana yang langsung diterima oleh pemerintah daerah akan rentan penyelewengan dan harus diawasi oleh publik.
- Pendapatan dari jasa-jasa lingkungan masih banyak yang belum imbang, padahal pendapatan dari jasa lingkungan (mis: tambang pasir) besar tapi dampaknya adalah merusak lingkungan. Dengan semakin rusaknya lingkungan maka kemungkinan terjadi bencana ekologis akan semakin besar.

- Kiat untuk melakukan replikasi pengalaman advokasi anggaran IDEA oleh lembaga-lembaga lain:
 - ❖ Pemahaman terhadap proses-proses perencanaan pembangunan dan jadwalnya (Musrenbang).
 - ❖ Pemahaman terhadap proses-proses perencanaan dan penganggaran.
 - ❖ Analisis RPJMD sensitif PRB.
 - ❖ Pelajari buku “MEREDAM RISIKO BENCANA: Upaya Integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah”.
 - ❖ Pelajari buku “Mengurai Pundi Rakyat” yang diterbitkan oleh IDEA.



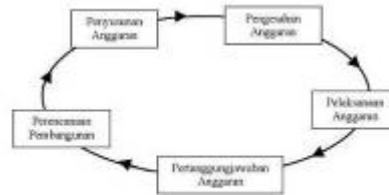
- Point-point untuk Analisis RPJMD Sensitif PRB antara lain:
 - ❖ Ketersediaan Dokumen PRB
 - ✓ Sudahkah daerah memiliki: Rencana Penanggulangan Bencana Daerah?
 - ✓ RAD PRB
 - ✓ Rencana Kontijensi
 - ✓ RTRW yang mengintegrasikan peta risiko bencana
 - ✓ Latar Belakang Penyusunan RPJMD
 - ✓ Sudahkah Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJMD mengakomodasi tujuan PRB
 - ✓ Sudahkah Landasan Normatif Penyusunan RPJMD mencantumkan UU 24/2007 tentang Penanggulangan



- ✓ Bencana dan aturan-aturan turunannya
- ✓ Sudahkah dokumen RPJMD menjelaskan hubungan RPJMD dengan dokumen Rencana Penanggulangan Daerah

❖ Keterpaduan Perencanaan

- ✓ Sudahkah RPJMD mencantumkan Profil Ancaman Bencana Daerah?
- ✓ Sudahkah profil perekonomian, sosial budaya, sarana dan prasarana, pemerintahan umum, dan analisis kewilayahan mengidentifikasi aset-aset penghidupan berisiko (kerentanan) dan daya tahan terhadap bencana? (kapasitas)



Tahun	Tahapan	Bulan																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
2004	Pelaksanaan	█												█															
	Pertanggung jawaban	█												█															
2005	Perencanaan	█				█				█				█				█				█							
	Penyusunan	█				█				█				█				█				█							
	Pengesahan	█				█				█				█				█				█							
	Pelaksanaan	█												█						█									
2006	Perencanaan	█				█				█				█				█				█							
	Penyusunan	█				█				█				█				█				█							
	Pengesahan	█				█				█				█				█				█							
	Pelaksanaan	█												█						█									

- ✓ Isu dan Permasalahan Strategis
- ✓ Sudahkah dokumen RPJMD memuat analisis dan rumusan yang jelas tentang masalah PRB di daerah?
- ✓ Visi, Misi, dan Program
- ✓ Sudahkah rumusan visi kepala daerah telah memperhitungkan aspek PRB?
- ✓ Sudahkah rincian misi pembangunan mencantumkan aspek PRB?
- ✓ Adakah agenda program jelas, terarah, dan berorientasi pada PRB?

❖ Strategi Pembangunan daerah

- ✓ Sudahkah risiko bencana menjadi bagian yang teridentifikasi dalam SWOT daerah?
- ✓ Kebijakan Keuangan Daerah
- ✓ Sudahkah rencana tindak prioritas pengelolaan keuangan 5 tahun ke depan merencanakan anggaran PRB?
- ✓ Sudahkah arah pengelolaan Pendapatan Daerah menghindari kebijakan pendapatan yang meningkatkan risiko bencana?
- ✓ Sudahkah arah pengelolaan Belanja Daerah berupaya memenuhi kebutuhan untuk mencegah ancaman, melemahkan ancaman, dan melindungi aset penghidupan yang berisiko?

❖ Kebijakan Umum Pembangunan

- ✓ Sudahkah arah kebijakan pembangunan sektoral memperhatikan peta risiko bencana?
- ✓ Adakah rencana pengembangan kelembagaan untuk mengakomodasi fungsi PRB?
- ✓ Program Pembangunan Daerah
- ✓ Sudahkah program-program terkait fungsi dan urusan wajib pemerintah daerah mengambil peran yang memadai dalam siklus bencana yang mungkin terjadi?
- ✓ Sudahkah kebutuhan melemahkan dan mencegah ancaman berdasarkan peta risiko bencana diakomodasi?
- ✓ Sudahkah kebutuhan melindungi aset-aset penghidupan berisiko berdasarkan peta risiko bencana diakomodasi?
- ✓ Sudahkah program pembentukan kelembagaan penanggulangan bencana diakomodasi?

- IDEA menerapkan alat (metode) *Cost Benefit Analysis* (CBA) untuk biaya-biaya yang muncul yang terkait dengan risiko bencana di suatu daerah. Metode CBA ini sudah diterapkan di Ende (NTT), Bantul, Gunungkidul, Klaten, dan lain-lain. Contoh di Bantul: melalui kepala-kepala bidang di Bappeda Bantul melakukan diskusi terfokus dengan kepala-kepala bidang yang berada di urusannya masing-masing (mis: kepala bidang infrastruktur di Bappeda mengundang SKPD terkait infrastruktur) dan melakukan CBA dengan dipandu oleh IDEA. Hasilnya sangat membuka wawasan para pejabat

pemerintah daerah dalam melihat kaitan antara biaya-biaya yang muncul dan relasinya dengan risiko bencana di daerahnya.

- Bila ingin mendapatkan buku-buku terbitan IDEA berikut ini: Buku “MEREDAM RISIKO BENCANA: Upaya Integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah” dan Buku “MENGURAI PUNDI RAKYAT: Wong Cilik Sinau Pendapatan Daerah” silahkan menghubungi:
 - ❖ Mas Sunarja, IDEA (HP: 0817-269-645, Email: narjowae@yahoo.com)
 - ❖ Perkumpulan IDEA
Jl. Kaliurang KM 5 Gg. Tejomoyo CT III/9 Yogyakarta 55281
Telpfax: 0274-583-900
Email: idea@ideajogja.or.id
Website: <http://ideajogja.or.id>

Acara	Notulensi Diskusi Anggaran Penanggulangan Bencana pada Pemerintah Pusat
Tempat	Lt. 1 Sekretariat MPBI, Jakarta
Hari, tanggal	Kamis, 10 Juni 2010
Pukul	13.00 – 16.00 WIB
Agenda	Sesi I: Diskusi Buku 'MEREDAM RISIKO BENCANA: Upaya Integrasi PRB dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah' dg narasumber Sunarja, IDEA Sesi II: Diskusi anggaran PB pada Pemerintah Pusat dg narasumber Bp. Fatchul, Kabiro Perencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Moderator	Djuni Pristiyanto
Notulis	Djuni Pristiyanto

**DAFTAR PESERTA
DISKUSI ANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA
PADA PEMERINTAH DAERAH**

**Lt. 3 Sekretariat MPBI, Jakarta
Kamis, 10 Juni 2010, Pukul 13.00 – 16.00 WIB**

No	Nama	Lembaga	Alamat	Email
1	Sunarja	Perkumpulan IDEA	Jl. Kaliurang KM 5 Gg. Tejomoyo CT III/9 Yogyakarta 55281 Telp/fax: 0274-583-900 Email: idea@ideajogja.or.id Website: http://ideajogja.or.id	narjowae@yahoo.com
2	Riana Nedyawati	UN-TWG-DRR/ UNDP	Menara Thamrin Lt. 10. Jl. MH. Thamrin Kav.3, Jakarta 10250 Telp: 021-3141-308 Fax: 021-3190-0003	nedyawati@un.org
3	Dominica Novi	UNJSP-DRR	Menara Thamrin Lt. 10. Jl. MH. Thamrin Kav.3, Jakarta 10250	dominica.novi@un.or.id
4	M. Salahudin Hakim	BMP	Bekasi	mshakim69@yahoo.com
5	Didik Mulyono	Oxfam GB	Jl. Taman Margasatwa no 26 Pasar Minggu, Ragunan Jakarta Selatan	dmulyono@oxfam.org.uk
6	Djuni Pristiyanto	MPBI	Jl. Kebon Sirih No. 5G Jakarta Pusat	belink2006@yahoo.com.sg , djuni@mpbi.org
7	Faisal Djalal	MPBI	Jl. Kebon Sirih No. 5G Jakarta Pusat	faisal.djalal@gmail.com
8	Irhaz Ahmady	Disaster Management Eknas Walhi	Jl. Tegal Parang Utara No. 14, Jakarta 12790 Telp. 021-7919-3363, Fax. 021-794-1673. Email. info@walhi.or.id . Website: www.walhi.or.id	irhaz.a@gmail.com , irhaz@walhi.or.id
9	Delia Mustikasari	Jurnal Nasional	PT Media Nusa Pradana Jl. Pemuda No. 34 Jakarta 13220 Telp: 021-4706-233 Fax: 021-4786-248 Web: www.jurnalnasional.com	princesslia.girlie@yahoo.com
10	Bayu Novianto	Pusat Mitigasi Bencana (PMB) ITB	Jl. Ganesha No. 10 Bandung 40132 Gedung ex PAN Lt. 8	bawiyuke@yahoo.co.id
11	Jonathan Victor Rembeth	UNJSP-DRR	Menara Thamrin Lt. 10. Jl. MH. Thamrin Kav.3, Jakarta 10250	jonathan.rembeth@un.or.id